

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III
MERAUKE**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan kasih-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Tahun 2021 dapat tersusun, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya di berikan kepada Tim Lakip dan semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan atau pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atas pertanggungjawaban dan keberhasilan dalam melaksanakan program/kerja selama 1 (satu) tahun melalui beberapa indikator kinerja dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat tahun 2021. Laporan ini juga merupakan evaluasi kinerja Kantor Kesehatan pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2021 yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari pihak yang berkompeten guna peningkatan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke pada tahun - tahun berikutnya.

Merauke, Januari 2022

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Merauke



dr. Bambang Budiman

NIP 196905312006041001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2021 yang menjelaskan pencapaian target indikator-indikator sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja kegiatan masing-masing program diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke merupakan turunan dari Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) yang dalam prakteknya terdapat 7 (tujuh) Indikator yang kemudian dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Merauke. Terdapat 7 indikator dalam Perjanjian Kinerja KKP Kelas III Merauke tahun 2021 yaitu :

1. Jumlah pemeriksaan orang, barang, alat angkut dan lingkungan
2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara
4. Nilai kinerja anggaran
5. Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran
6. Kinerja implementasi WBK Satker
7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Fungsi dari penilaian indikator-indikator tersebut adalah menemukan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian hasil. Untuk dapat meningkatkan capaian kinerja di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke pada tahun berikutnya, diharapkan para Pelaksana Program melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas perencanaan, lebih mencurahkan konsentrasinya terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, selalu berkoordinasi untuk peningkatan jejaring kerja baik dengan lintas program dan lintas sektor serta kegiatan yang terarah dan berkesinambungan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR RINGKASAN/DEFENISI/ISTILAH.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I.PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan tujuan	2
C. Tugas pokok dan fungsi.....	2
D. Struktur organisasi.....	4
E. Sumber Daya Manusia	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II.PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. Perencanaan Kinerja.....	16
B Perjanjian Kinerja	18
BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Pengukuran Kinerja.....	20
B Sumber Daya Anggaran	50
C Sumber Daya Sarana dan Prasarana	54
BAB IV.PENUTUP	55
A Kesimpulan.....	55
B. Tindak Lanjut	56

DAFTAR SINGKATAN/DEFINISI/ISTILAH

KKP	: Kantor Kesehatan Pelabuhan
PLBD	: Pos Lintas Batas Darat, merupakan pintu masuk melalui darat di suatu Negara, termasuk yang digunakan oleh kendaraan darat dan kereta api.
Direktorat Jenderal P2P	: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Vektor	: Serangga atau hewan lain yang biasanya membawa bibit penyakit yang merupakan suatu risiko bagi kesehatan masyarakat
Alat angkut	: Pesawat udara, kapal laut, kereta api, kendaraan bermotor atau alat angkut lainnya yang digunakan dalam melakukan perjalanan internasional
Pelabuhan	: Pelabuhan laut atau pelabuhan yang terletak pada sungai dan danau, tempat kapal yang melakukan perjalanan datang dan berangkat.
PHEIC	: Public Health Emergency of International Concern, merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia
Karantina	: Pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang diduga terinfeksi penyakit meski belum menunjukkan gejala penyakit. Pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang yang diduga terkontaminasi dari orang/barang lainnya, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi
Sanitasi	: suatu usaha pencegahan penyakit dengan melenyapkan atau mengendalikan faktor-faktor risiko lingkungan yang merupakan mata rantai penularan penyakit

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Kenaikan Pangkat 13
Tabel 2	Kenaikan Gaji Berkala 14
Tabel 3	Rencana aksi kegiatan 2020-2024 17
Tabel 4	Rencana kinerja tahunan 18
Tabel 5	Perjanjian kinerja 19
Tabel 6	Target dan capaian kinerja 21
Tabel 7	Jumlah pengawasan orang, barang, alat angkut dan lingkungan 23
Tabel 8	Realisasi anggaran indikator jumlah pemeriksaan orang, barang, alat angkut dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan..... 24
Tabel 9	Data faktor risiko yang dikendalikan 26
Tabel 10	Realisasi anggaran indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut dan lingkungan 31
Tabel 11	Persentase parameter indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 34
Tabel 12	Realisasi anggaran indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 34
Tabel 13	Indikator SMART serta persentase bobot 35
Tabel 14	Realisasi anggaran indikator nilai kerja anggaran (IKPA) 37
Tabel 15	Indikator IKPA serta persentase bobot 38
Tabel 16	Realisasi anggaran nilai indikator nilai kerja anggaran (IKPA) 44
Tabel 17	Realisasi anggaran indikator kinerja implementasi WBK Satker 42
Tabel 18	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN 44
Tabel 19	Realisasi anggaran indikator persentase peningkatan kapasitas ASN .sebanyak 20 JPL 46
Tabel 20	Capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 47
Tabel 21	Capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan KKP Kelas III Kupang 48
Tabel 22	Realisasi belanja persumber dana 50
Tabel 23	Persentase Serapan anggaran perbulan 51
Tabel 24	Penerimaan dan Realisasi PNBK 52

Tabel 25	Realisasi pelayanan output	53
Tabel 26	Neraca sarana dan prasarana ..	54

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1	Distribusi ASN berdasarkan jabatan 9
Grafik 2	Distribusi ASN berdasarkan latar belakang pendidikan..... 10
Grafik 3	Rincian pegawai honorer berdasarkan Penerimaan 12
Grafik 4	Distribusi ASN dan Honorer berdasarkan wilayah kerja 13
Grafik 5	Distribusi ASN berdasarkan golongan 12
Grafik 6	Perbandingan capaian indikator antara KKP Merauke dan KKP Kupang 49
Grafik 7	Perbandingan anggaran, realisasi dan wilayah kerja anantara KKP Merauke dan KKP Kupang 49
Grafik 8	Realisasi belanja persumber dana 51
Grafik 9	Persentase serapan anggaran perbulan 52

DAFTAR GAMBAR		Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi	4
Gambar 2	Wilker Pelabuhan Laut Agats	5
Gambar 3	Wilker Pelabuhan Laut Bade	6
Gambar 4	Wilker Pelabuhan Laut Wanam	6
Gambar 5	Wilker PLBDN Sota	7
Gambar 6	Wilker PLBD Mindiptana	8
Gambar 7	Pos Pelabuhan Laut Merauke	8
Gambar 8	Pos Bandara Mopah Merauke	9
Gambar 9	Nilai SMART DJA	36
Gambar 10	Nilai IKPA	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan upaya Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan masyarakat dengan derajat kesehatan setinggi-tingginya, maka diperlukan tujuan, kebijakan dan strategi dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Ancaman kesehatan masyarakat lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah ancaman dalam bentuk risiko biologi, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit *zoonosis* (penyakit tular hewan), kedaruratan kesehatan masyarakat, dan ancaman penyakit yang baru muncul (*new emerging diseases*). Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait kesiapsiagaan menghadapi penyakit baru muncul (*new emerging diseases*), khususnya dalam menyiapkan sistem kesehatan yang mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang baru adalah penyakit *zoonosis*, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya. Penduduk Indonesia yang padat dengan geografis yang luas menyebabkan terbukanya transportasi di dalam negeri maupun antar negara yang dapat menyebabkan masuknya agen penyakit baru.

Ancaman ketahanan kesehatan dapat muncul dalam bentuk ancaman biologi, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit baru, kekurangan pangan, terlepas dari asal atau sumbernya. Sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang (baru) muncul adalah

penyakit *zoonosis*. Munculnya penyakit Covid-19 pada akhir tahun 2019 yang telah diumumkan oleh Badan Kesehatan Dunia pada awal tahun 2020 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pandemi telah membuka mata kita semua bahwa setiap negara termasuk Indonesia harus melakukan kesiapsiagaan (*preparedness*) dalam menghadapi penyakit infeksi baru, baik kemampuan pencegahan (*to prevent*), penemuan (*to detect*), dan merespon (*to respond*).

Terbukanya transportasi secara luas di dalam negeri maupun antar negara dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk itu, respon ketahanan kesehatan atau *health security* penting untuk dilakukan. Evaluasi eksternal gabungan atau *Joint External Evaluation* (JEE) tahun 2017 mengidentifikasi bahwa sistem ketahanan kesehatan Indonesia masih lemah di bidang koordinasi dengan sektor lain. Dalam pencegahan, deteksi dan respon terhadap kondisi darurat kesehatan masyarakat; kualitas pengawasan, khususnya terkait patogen yang resisten terhadap antibiotik, penyakit infeksi baru, dan PD3I; dan analisis dan komunikasi data. Karena penyakit infeksi baru hampir semuanya bersifat *zoonosis* dan berkaitan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke berperan dalam mewujudkan **Visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dan pelaksanaan 9 misi pembangunan, khususnya misi ke-1 yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Sesuai arahan Presiden RI terkait pembangunan SDM yakni pembangunan SDM pekerja yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Kementerian kesehatan memiliki peran penting dalam rangka mencapai 9 (sembilan) agenda prioritas nasional yang dikenal dengan Nawacita, terutama agenda ke-5 meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Pembuatan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke secara tertulis, untuk mengetahui pencapaian program/kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2021, yang harus dipertanggungjawabkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Permenkes Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan yang menyebutkan Klasifikasi KKP sebagaimana dimaksud meliputi KKP Kelas I, II, III dan IV. KKP Kelas I berjumlah 7 (tujuh) KKP, KKP Kelas II berjumlah 26 (dua puluh enam), KKP Kelas III berjumlah 16 (enam belas) KKP, dan KKP Kelas IV berjumlah 2

(dua) KKP. Kantor Kesehatan Pelabuhan memiliki Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan

KKP mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko Kesehatan di wilayah kerja Pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

2. Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan

- a. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko Kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko Kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/ atau lingkungan;
- d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko Kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/ atau lingkungan;
- e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- g. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan Kesehatan;
- h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan Kesehatan;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan Kesehatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kekarantinaan Kesehatan; dan
- k. Pelaksanaan urusan administrasi KKP

D. Struktur Organisasi



Gambar 1 Struktur Organisasi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke terletak di Jl. Prajurit No. 01 Merauke Provinsi Papua, berdasarkan struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian administrasi umum
3. Kelompok jabatan fungsional

Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP Merauke, maka dibentuk Wilker KKP Merauke yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Wilker KKP merupakan unit kerja fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KKP. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KKP sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional yang

mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai bidang dan tugas masing-masing, penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan ketrampilan.

Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 29 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua, terletak dibagian selatan dan memiliki wilayah terluas diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Secara geografis, Kabupaten Merauke terletak pada 137° - 141° BT dan 6° - 9° LS. Luas Kabupaten Merauke ±45.071 km². Sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke merupakan dataran rendah dan berawan. Secara geografis, berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea dan Australia. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke memiliki 5 wilayah kerja yang terletak di 4 (empat) kabupaten :

a. Wilker Pelabuhan Laut Agats/Asmat

Wilker Pelabuhan Laut Agats terletak di Kabupaten Asmat, Wilker Pelabuhan Laut Agats dapat ditempuh melalui jalur udara dengan waktu tempuh 1 jam atau jalur perjalanan laut selama ±48 jam. Sumber Daya Manusia sebanyak 2 (dua) Orang yang terdiri dari koordinator wilayah dengan latar belakang pendidikan D3 Kesehatan Lingkungan dan 1 (satu) orang tenaga honorer dengan latar belakang pendidikan SMA (petugas kebersihan)



Gambar 2 Kantor Wilker Pelabuhan Laut Agats

b. Wilker Pelabuhan laut Bade

Wilker Pelabuhan Laut Bade terletak di Kabupaten Mappi, Wilker Pelabuhan Laut Bade dapat ditempuh melalui jalur penerbangan dengan waktu tempuh 45 menit atau melalui jalur darat selama 6 jam dan dilanjutkan dengan menggunakan speedboat selama 4 jam. Sumber Daya Manusia di Pelabuhan Laut Bade sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang koordinator wilayah kerja dengan latar

belakang pendidikan Entomolog dan dibantu 1 (satu) orang tenaga honorer dengan latar belakang pendidikan SMA (petugas kebersihan)



Gambar 3 Kantor Wilker Pelabuhan Laut Bade

c. Wilker Pelabuhan Laut Wanam

Wilker Pelabuhan Laut Wanam terletak di Kabupaten Merauke, Wilker Pelabuhan Laut Wanam dapat ditempuh melalui jalur penerbangan dengan waktu tempuh 45 menit atau melalui jalur laut dengan waktu tempuh 36 jam. Sumber Daya Manusia di Pelabuhan Laut Wanam 1 (satu) orang ang koordinator wilayah kerja dengan latar belakang pendidikan perawat



Gambar 4 Pelabuhan Laut Wanam

d. Wilker Pos Lintas Batas Darat Sota (PLBD)

Wilker Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) Sota terletak di Kabupaten Merauke, Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) Sota dapat ditempuh melalui jalur darat dengan waktu tempuh 1,5 jam (80 km). Sumber Daya Manusia di Pos Lintas Batas Darat Sota (PLBD) 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang koordinator wilayah kerja dengan latar belakang pendidikan dokter, 1 (satu) orang Sanitarian dan dibantu 1 orang tenaga honorer dengan latar belakang pendidikan SMA (petugas keamanan)



Gambar 5 Kantor Wilker PLBDN Sota

e. Wilker Pos Lintas Batas Darat Mindiptana

Wilker Pos Lintas Batas Darat Mindiptana berada di Kabupaten Boven Digoel Distrik Kombut (pemekaran dari Distrik Mindiptana), dapat ditempuh melalui jalur penerbangan dengan waktu tempuh 45 menit atau melalui jalur darat selama 10-11 jam. Perjalanan darat dari Kabupaten Merauke melewati Kabupaten Boven Digoel dengan jarak tempuh sekitar 475 km dalam waktu 8 Jam, kemudian dilanjutkan ke Distrik Mindiptana dengan jarak tempuh 110 km dalam waktu 2,5 jam. Dari Distrik Mindiptana menuju Distrik Kombut jaraknya 11 km dengan waktu tempuh 30 menit jika akses jalan bagus, tetapi jika hujan dan jalan rusak maka waktu tempuh bisa sampai 3 jam. Sumber Daya Manusia di Pos Lintas Batas Darat Mindiptana 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang koordinator wilayah kerja dengan latar belakang pendidikan sanitarian dan dibantu 2 (dua) orang tenaga honorer dengan latar belakang pendidikan SMA sebagai petugas kebersihan dan pramubakti.



Gambar 6 Wilker PLBD Mindiptana Distrik Kombut

f. Pos Pelabuhan Laut Merauke

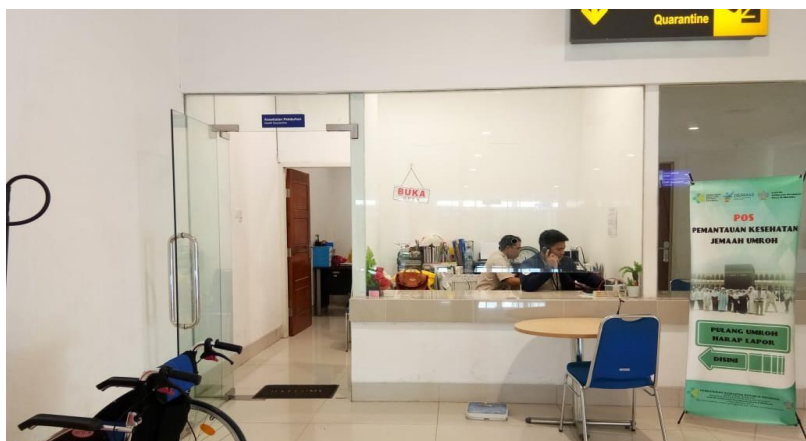
Pelabuhan Laut Merauke terletak di Kabupaten Merauke yang dapat ditempuh melalui jalur darat selama \pm 10 menit. Setiap hari petugas dari induk dijadwalkan melakukan pengawasan di Pelabuhan laut Merauke



Gambar 7 Pos Pelabuhan Laut Merauke

g. Pos Bandar Udara Mopah

Bandar Udara Kelas I Mopah merupakan bandara kelas I yang menghubungkan Kabupaten Merauke dengan kota-kota lain di Indonesia, terdapat 3 Maskapai penerbangan Nasional yang beroperasi di Bandara Mopah yaitu : maskapai penerbangan Garuda Air Lines, Lion Air Lines, dan Batik Air yang menggunakan Pesawat Boing 373-800NG, disamping itu juga terdapat Maskapai Susi Air dengan pesawat sejenis Twin otter/Caravan dan Pesawat Hercules milik TNI yang mengangkut bahan keperluan TNI dan mengangkut porsonil militer lainnya. Setiap hari petugas dari kantor induk dijadwalkan bertugas di Bandara Mopah.



Gambar 8 Pos Bandar Udara Mopah

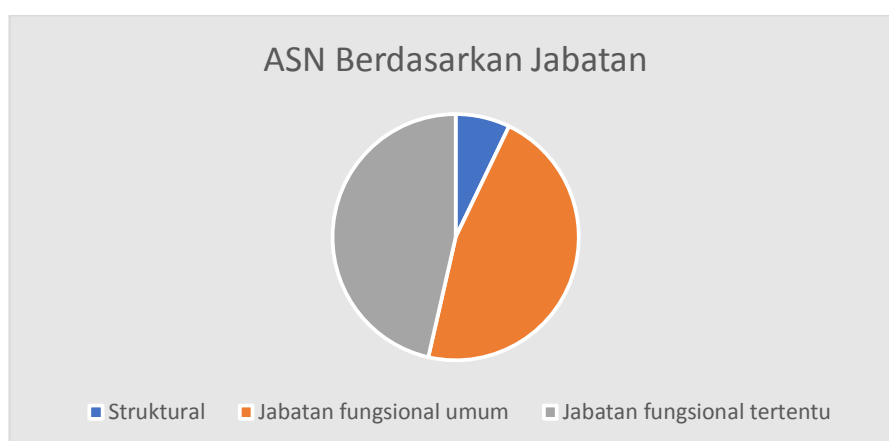
E. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Jumlah SDM (pegawai) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke per 31 Desember 2020 sebanyak 50 orang (PNS sebanyak 28 orang dan tenaga honorer sebanyak 22 orang) dan rincian jumlah pegawai PNS sebagai berikut :

1. Menurut Jabatan

- a. Jabatan Struktural : 2 orang
- b. Jabatan Fungsional Umum : 13 orang
- c. Jabatan Fungsional tertentu : 13 orang



Grafik 1 : Distribusi ASN Berdasarkan Jabatan

2. Tingkat dan Jenis Pendidikan

a. Profesi

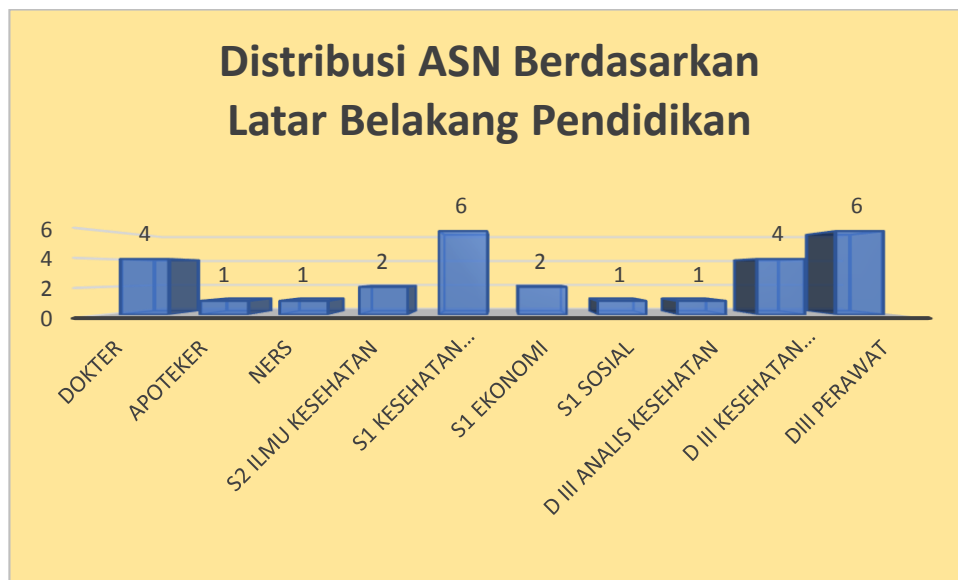
- Dokter : 4 orang
- Apoteker : 1 orang
- Ners : 1 orang
- Strata 2 (S2)
- S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat : 2 orang

b. Strata 1 (S1)

- S1 Kesehatan Masyarakat : 6 orang
- S1 Ekonomi : 2 orang
- S1 Sosial : 1 orang

c. Diploma 3 (D III)

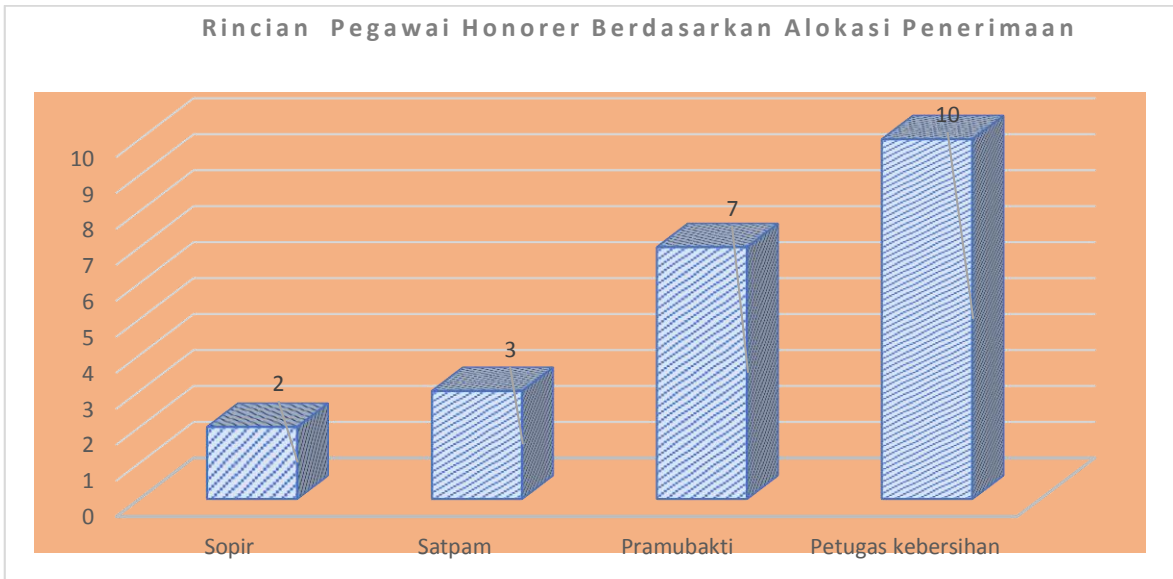
- D – III Analisis Kesehatan : 1 orang
- D – III Kesehatan Lingkungan : 4 orang
- D – III Perawat : 6 orang



Grafik 2 : Distribusi ASN Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

3. Rincian pegawai honorer berdasarkan alokasi penerimaan sebagai berikut :

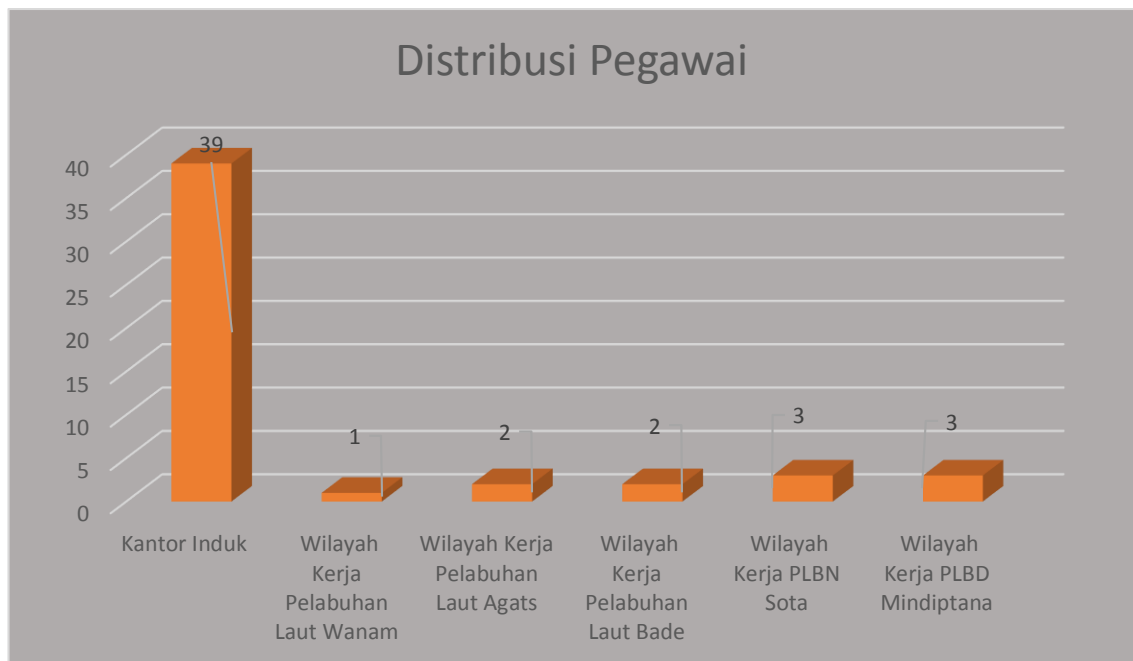
- Sopir : 2 orang
- Satpam : 3 orang
- Pramubakti : 7 orang
- Petugas kebersihan : 10 orang



Grafik 3 Rincian Pegawai Honorer Berdasarkan Alokasi Penerimaan

4. Distribusi pegawai berdasarkan wilayah kerja

- Kantor Induk : 39 orang
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Wanam : 1 orang
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Agats : 2 orang
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Bade : 2 orang
- Wilayah Kerja PLBN Sota : 3 orang
- Wilayah Kerja PLBD Mindiptana : 3 orang

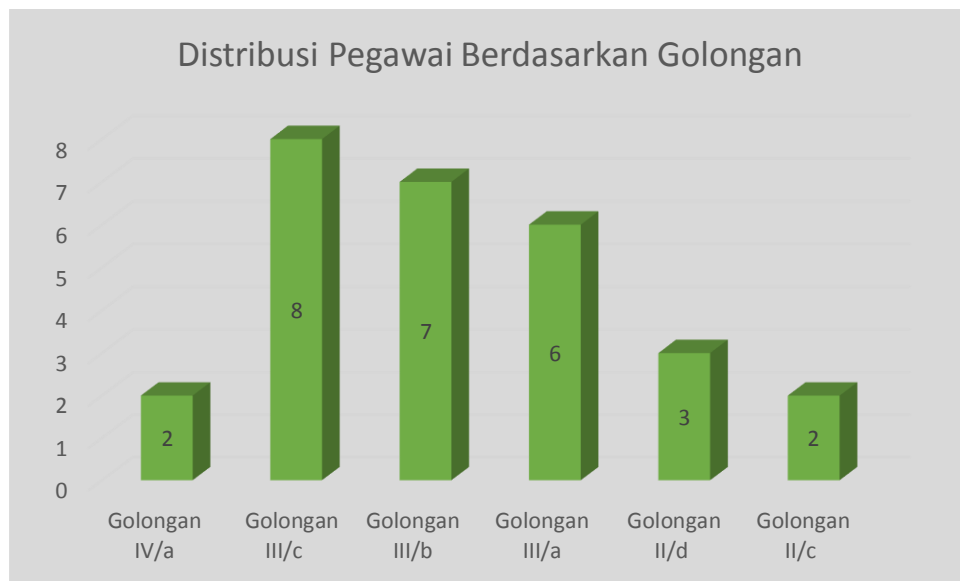


Grafik 4 Distribusi pegawai berdasarkan wilayah kerja

Distribusi pegawai di kantor induk sebanyak 39 orang, hal ini disebabkan karena di wilayah Merauke selain Pelabuhan Laut Yos Sudarso, Pelabuhan Laut Perikanan Nusantara, Pelabuhan Pertamina dan Pelabuhan Kelapa Lima juga terdapat pelabuhan rakyat diantaranya adalah : Pelabuhan Gudang arang, Pelabuhan Cikombong, Pelabuhan Sidomulyo, Pelabuhan Kumbe, Pelabuhan Kali Tamu, Pelabuhan Matandi, Pelabuhan Serapu dan Pelabuhan Lampu Satu. Setiap hari pegawai di kantor induk ditugaskan secara bergantian untuk melakukan pengawasan di pelabuhan dan Bandara Mopah Merauke.

5. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan

- Golongan IV/a : 2 orang
- Golongan III/c : 8 orang
- Golongan III/b : 7 orang
- Golongan III/a : 6 orang
- Golongan II/d : 3 orang
- Golongan II/c : 2 orang



Grafik 5 Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan

6. Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyatakan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggara upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Peraturan

Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir ASN dapat dicapai melalui pendidikan formal berupa tugas belajar. Sesuai amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai salah satu organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan perlu melaksanakan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Salah satu bentuk pengembangan SDM Kesehatan dilaksanakan melalui program pendidikan berkelanjutan diantaranya tugas belajar. Surat Edaran ini dimaksudkan dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM kesehatan yang memiliki kualifikasi, keahlian atau kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS. Upaya memberikan kesempatan kepada setiap pegawai dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke telah mengirimkan pegawai untuk dapat meningkatkan jenjang pendidikan melalui tugas belajar. Tahun 2020 terdapat 1 orang pegawai atas nama Batseba Linda Imsula yang melakukan tugas belajar di Universitas Cenderawasih Jayapura atas nama Batseba Linda Imsula dengan peminatan Keperawatan.

7. Kenaikan Pangkat

Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke yang diusulkan untuk kenaikan pangkat untuk periode April 2021 dan Oktober 2021 dapat dilihat pada tabel :

Tabel 1 Kenaikan Pangkat Pegawai

NO	NAMA	NIP	GOL LAMA	GOL BARU	KETERANGAN
1	Aan Hendra Sukma, SKM	197910112005021005	III b	III c	SK telah diterima
2	Feri Henos Rerey, SKM	197409062002121007	III b	III c	SK telah diterima
3	Diana Beatrix	198012182005012003	III b	III c	SK telah diterima
4	Batseba Linda Imsula	198109122008122001	III b	III c	SK telah diterima
5	Gumson Josua Tampubolon, SKM, MPH	198510172008011007	III b	III c	SK telah diterima
6	Eni Sartika Simanjuntak	198007142014072007	II b	III a	SK telah diterima

8. Kenaikan Gaji Berkala

Tabel 2 Kenaikan Gaji Berkala

No	Nama	NIP	TMT KGB
1	Feri Henos Rerey, SKM	197409062002121007	1 Januari 2021
2	Rosjunaida Malau, SE	197506072014072001	1 Februari 2021
3	Sutrisno, S.Sos	196309081986031002	1 Maret 2021
4	Bertha Tange, B.Sc	196703271989032001	1 Maret 2021
5	Yulianti Lande, S.Si., Apt.	197407161994032002	1 Maret 2021
6	Delifour Bekia Br. Hutagaol, SKM	197502262002122001	1 Maret 2021
7	Diana Beatrix Samon, Amd, KL	198012182005012003	1 Maret 2021
8	Lilik Nur Khilodah, Amd, Kep	198309292015032002	1 Maret 2021
9	dr. Andi Farida	198410272015032003	1 Maret 2021
10	dr. Ika Juwita	198609232015032004	1 Maret 2021
11	Afrina Musfiraa Amd, KL	198704162015032004	1 Maret 2021
12	Rika Pratiwi Amd, KL	198906112015032004	1 Maret 2021
13	Oktavia Marindatu, SKM	198910062015032006	1 Maret 2021
14	dr. Bambang Budiman	196905312006041001	1 Desember 2021
15	Desi Rahmawati, SKM	198002192003122002	1 Desember 2021

F. Sistematika Penulisan

1. Kata Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Daftar Isi
4. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulis laporan, maksud dan tujuan penulisan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke.

5. Bab II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

Bab ini menguraikan hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke pada tahun 2021, meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja

Uraian singkat tentang Rencana Aksi Kegiatan tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke

- b. Perjanjian Kinerja

Uraian singkat tentang Penetapan Kinerja KKP Kelas III Merauke Tahun 2021

c. Bab III

Pada bagian ini disajikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja yang didalamnya menjelaskan analisis per indikator dengan mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan indikator maupun yang bersifat pendukung, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi serta usulan pemecahan masalah yang akan diambil

Pada bagian ini disajikan juga beberapa sumber daya yang mendukung dalam pencapaian kinerja, Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Sarana dan Prasarana.

d. Bab IV Kesimpulan

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan pencapaian kinerja KKP Kelas III Merauke serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan tahun depan.

e. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Form Pengukuran Kinerja (PK)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima tahun) secara sistematis dan berkesinambungan. Perencanaan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tertuang di dalam Rencana Aksi Kegiatan tahun 2020-2024

1. Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024

Renstra Kementerian Kesehatan dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Program (RAP) Eselon I dan oleh Unit Pelaksana Tekhnis dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Kegiatan (RAK). Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan berupaya untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan dalam RAK dengan melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian sasaran dan tujuan program. Sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, RAK KKP Kelas III Merauke 2020-2024 telah menetapkan 7 indikator kinerja Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan target indikator sasaran secara bertahap setiap tahun mulai Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

7 (tujuh) indikator yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan elayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara
4. Nilai kinerja anggaran
5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan
6. Kinerja implementasi WBK Satker
7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Adapun target yang harus dicapai dalam Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024 dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3 Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	297332	324800	355698	384656	413614
		2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90 %	95%	95 %	95 %	95 %
		3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	85 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		4	Nilai kinerja anggaran	80	83	85	90	90
		5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %
		6	Kinerja implementasi WBK Satker	70	75	80	85	85
		7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45 %	80 %	80 %	80 %	80 %

2. Rencana Kinerja Tahunan

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dalam melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/ atau faktor risiko Kesehatan di wilayah kerja Pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke menetapkan Rencana Kinerja Tahunan dengan target yang harus dilaksanakan/dicapai

Sasaran strategi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke adalah meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah dengan 7 (tujuh) indikator yang harus dilaksanakan dan dicapai, adapun indikator dan target tersebut dapat dilihat pada tabel :

Tabel 4 Rencana Kinerja Tahun 2021

NO	OUTPUT RKA-KL	TARGET	ALOKASI
1	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		Rp. 4.312.315.000
	a. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekearifan kesehatan	324.800	Rp. 2.776.170.000
	b. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%	Rp. 915.894.000
	c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	90%	Rp. 620.251.000
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		Rp. 7.710.533.000
	a. Nilai kinerja anggaran	83	Rp. 3.263.010.000
	b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	Rp. 4.185.762.000
	c. Kinerja implementasi WBK satker	75	Rp. 76.939.000
	d. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%	Rp. 184.822.000
	Total		Rp. 12.022.848.000

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja atau penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2021 merupakan pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada akhir tahun 2020. Penetapan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana aksi Program Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan rencana aksi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke yang setiap tahunnya di operasionalkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan telah mendapat persetujuan anggaran. Penetapan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2021 telah disusun, di dokumentasikan dan ditetapkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke pada akhir tahun 2020 setelah turunnya DIPA dan RKA-KL Tahun 2021. Target-target kinerja sasaran kegiatan yang ingin dicapai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2021. Jumlah anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke

Tahun 2021 sebesar **Rp. 12,022.848.000,-**.

Tabel 5 Perjanjian Kinerja tahun 2021

NO	OUTPUT	TARGET
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	
	d. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekearifan kesehatan	324.800 Layanan
	e. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%
	f. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	90%
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	e. Nilai kinerja anggaran	83
	f. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
	g. Kinerja implementasi WBK satker	75
	h. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran dan analisis terhadap pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dilaksanakan setiap akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang ditetapkan dalam penetapan kinerja yang dapat mengukur keberhasilan serta kegagalan sasaran dan tujuan organisasi. Pengukuran keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum pada indikator. Selain itu pengukuran dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu.

Penetapan indikator kinerja memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang akan diukur secara kuantitatif dan kualitatif sebagai penentuan tercapainya tujuan organisasi. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke melaksanakan proses penetapan kinerja sebagai salah satu bentuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran target-target penetapan kinerja untuk mengetahui tingkat capaian kinerja yang dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke. Diperlukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam tercapainya kinerja setiap indikator, faktor penghambat dan pendukung yang telah teridentifikasi kemudian dicarikan usulan pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan agar tidak terulang kembali di tahun mendatang.

1, Capaian Kinerja Tahun 2021

Persentase Capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian kinerja yang diperoleh dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdapat dua sasaran yang harus dicapai yaitu meningkatnya kekarantinaan di pintu masuk dan wilayah dan meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit. Dari 2 (dua) sasaran terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah ditetapkan targetnya. Adapun capaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dapat dilihat pada tabel.

Tabel 6 Target dan Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Indikator	Definisi Operasional Indikator	Cara Hitung			Tahun 2021		
			Target	Capaian	Persentase Capaian	Target	Capaian	Persentase Kinerja
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar	Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun	324.800	384.492	118%	324.800	384.492	118%
		Jumlah pemeriksaan orang	307.925	361.481				
		Jumlah pemeriksaan alat angkut	16.660	14.391				
		Jumlah pemeriksaan barang	91	633				
		Jumlah pemeriksaan lingkungan	124	7.987				
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun (pada indikator no.1)	1.076	1.076	100%	95%	100%	105%
		Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang	15	15				
		Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada alat angkut	846	846				
		Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada alat barang	116	116				
		Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada lingkungan	99	99				
3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun			106%	90%	106%	118%
		Kelengkapan data surveilans	2.484	1628	66%			
		Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspn kurang dari 24 jam	96	73	76%			
		Penyusunan dokumen renkon yang baru	1	1	100%			
		Indeks pinjal ≤ 1	45	53	118%			
		HI perimeter = 0	60	56	93%			
		Tidak ditemukan larva anopheles	60	65	108%			
		kepadatan kecoa rendah	60	65	108%			
		kepadatan Lalat > 2	60	65	108%			
		TTU memenuhi syarat	98	119	121%			
		TPM laik hygiene	28	49	175%			
		Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	1080	1039	96%			

4	Nilai Kinerja anggaran	Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik	83	86	104%	83	86	104%
5	Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi	93	96	103%	93	96	103%
6	Kinerja implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assesment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.	75	71,95	96%	75	71,95	96%
7	Persentase peningkatan kapasitas SDM sebanyak 80 JPL	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	80%	83%	104%	80%	83%	104%

Pengukuran kinerja setiap indikator, keberhasilan dan kegagalan dapat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantina kesehatan
 - 1) Defenisi Operasional
Jumlah pemeriksaan penapisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun
 - 2) Rumus/Cara perhitungan
Akumulasi jumlah pemeriksaan penapisan orang, pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina, pemeriksaan barang dan pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM, air dan udara)

3) Capaian Indikator

Capaian indikator dapat dilihat pada tabel

Tabel 7: Jumlah Pengawasan Orang, Barang, Alat Angkut dan Lingkungan

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR SATKER	TARGET	PERENCANAAN KUMULATIF												Total
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan Kesehatan dengan hasil sertifikat PHQC,SSCEC	324.800	27.059	54.130	81.204	108.275	135.344	162.414	189.481	216.549	243.615	270.682	297.746	324.800	324.800
	Jumlah kedatangan penumpang kapal/pesawat (DN)		97.845	8.154	16.308	24.462	32.616	40.770	48.924	57.078	65.232	73.386	81.539	89.692	97.845	97.845
	Jumlah keberangkatan penumpang kapal/pesawat (DN)		105.766	8.814	17.628	26.442	35.256	44.070	52.884	61.698	70.512	79.326	88.140	96.953	105.766	105.766
	Jumlah kedatangan penumpang kapal/pesawat (LN)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah keberangkatan penumpang kapal/pesawat (LN)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pelintas Batas yang masuk (WNA)		628	52	105	158	211	264	316	368	420	472	524	576	628	628
	Jumlah Pelintas Batas yang keluar (WNI)		192	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	192
	Jumlah kedatangan ABK kapal/kru pesawat (DN)		46.030	3.834	7.670	11.506	15.342	19.178	23.014	26.850	30.686	34.522	38.358	42.194	46.030	46.030
	Jumlah keberangkatan ABK kapal/kru pesawat (DN)		55.302	4.603	9.212	13.821	18.430	23.039	27.648	32.257	36.866	41.475	46.084	50.693	55.302	55.302
	Jumlah kedatangan ABK kapal/kru pesawat (LN)		98	8	17	26	34	42	50	58	66	74	82	90	98	98
	Jumlah keberangkatan ABK kapal/kru pesawat (LN)		117	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	117	117
	Jumlah screening TB		550	46	92	138	184	230	276	322	368	414	460	506	550	550
	Jumlah screening HIV		500	42	84	126	168	210	252	294	336	378	420	462	500	500
	Jumlah screening Malaria		897	75	150	225	300	375	450	525	600	675	750	825	897	897
	Jumlah kedatangan kapal/pesawat (LN)		6		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
	Jumlah keberangkatan kapal/pesawat (LN)		6		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
	Jumlah kedatangan kapal/pesawat (DN)		8.044	670	1.340	2.014	2.684	3.354	4.024	4.694	5.364	6.034	6.704	7.374	8.044	8.044
	Jumlah keberangkatan kapal/pesawat (DN)		8.604	717	1.434	2.151	2.868	3.585	4.302	5.019	5.736	6.453	7.170	7.887	8.604	8.604
	Lingkungan		124	10	20	31	42	53	64	74	84	94	104	114	124	124
	Barang		91	8	16	24	32	40	48	56	63	70	77	84	91	91

- 4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
 - a) Membuat jadwal kegiatan rutin per bulan
 - b) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap minggu
 - c) Berkoordinasi dengan lintas sektor dan lintas program terkait dalam hal tugas pengawasan dan pemeriksaan yang akan dilakukan.
 - d) Membuat media komunikasi online untuk mempermudah komunikasi
- 5) Analisa Penyebab Keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan orang, alat angkut, barang
 - a) Adanya jadwal petugas pemeriksa meskipun bisa berubah jam pelaksanaan
 - b) Koordinasi yang baik dengan mitra kerja terkait permohonan pemeriksaan
 - c) Adanya media komunikasi online untuk mempermudah komunikasi dengan pengguna jasa
- 6) Kendala/masalah yang dihadapi
 - a) Jadwal kedatangan/keberangkatan kapal tidak menentu karena tergantung pada pasang surut air
 - b) Jadwal kedatangan/keberangkatan pesawat perintis tergantung kondisi cuaca di daerah Merauke
 - c) Adanya perbedaan data manifest dari agen pelayaran dengan hasil pengawasan yang dilakukan karena beberapa penumpang naik/turun tidak membeli tiket (tidak mampu)
 - d) Pemeriksaan PCR di RSUD hanya dilakukan pada hari Senin, Rabu dan Jumat saja, sehingga beberapa pelaku perjalanan yang harus berangkat secara tiba-tiba tdk dapat melakukan pemeriksaan PCR
- 7) Pemecahan Masalah
 - a) Menyiapkan team petugas clearance in/out yang standby untukantisipasi kapal yang berubah sewaktu-waktu
 - b) Memberikan usul ke pihak Pemda Kab. Merauke agar fasyankes dapat melakukan pemeriksaan PCR setiap hari

8) Efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 8

Realisasi anggaran indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan Kesehatan

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Dana	
1	Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara	31.200.000	31.166.000	34.000	1
2	Layanan kekarantinaan kesehatan di PLBD	28.800.000	23.291.000	5.509.000	1
3	<i>Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus</i>	<i>115.900.000</i>	<i>101.870.929</i>	<i>14.029.071</i>	<i>1</i>
4	<i>Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Lainnya (Event Nasional, Event Internasional, Keagamaan, Kebudayaan)</i>	<i>32.700.000</i>	<i>28.426.516</i>	<i>4.273.484</i>	<i>1</i>
5	Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS	15.203.000	11.826.000	3.377.000	1
6	deteksi dini terduga TB	38.950.000	38.909.000	41.000	1
7	<i>Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan Orang,Barang, Alat Angkut pada situasi KLB/Wabah/KKM termasuk pada Pelaksanaan PON</i>	<i>147.910.000</i>	<i>147.539.861</i>	<i>370.139</i>	<i>1</i>
8	<i>Survei Migrasi Malaria (Termasuk dalam pelaksanaan PON)</i>	<i>58.800.000</i>	<i>53.327.139</i>	<i>5.472.861</i>	<i>1</i>
9	<i>Surveilans/Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada Situasi Khusus KLB/Wabah/KKM Termasuk pelaksanaan PON</i>	<i>112.783.000</i>	<i>79.043.000</i>	<i>33.740.000</i>	<i>1</i>
10	<i>Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Kesehatan</i>	<i>32.637.000</i>	<i>30.934.586</i>	<i>1.702.414</i>	<i>1</i>
11	<i>Pemeriksaan Alat Angkut, Orang dan Barang pada situasi KLB, Wabah/KKM termasuk pelaksanaan PON</i>	<i>216.120.000</i>	<i>211.654.880</i>	<i>4.465.120</i>	<i>1</i>
12	<i>Pngadaan Thermalscanner, Thermascanner Digital IR</i>	<i>1.920.000.000</i>	<i>1.845.395.462</i>	<i>74.604.538</i>	<i>1</i>
13	Layanan Kekarantinaan/ Pengawasan di Pintu Masuk	57.867.000	53.335.000	4.532.000	1
	Jumlah	2.808.870.000	2.656.719.373	152.150.627	

$$CKi = 118\% (1,18)$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{((2.808.870.000 \times 1,18) - 2.2656.719.373)}{2.808.870.000 \times 1,18} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 19,8\%$$

b. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

1) Defenisi Operasional

Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun (pada indikator no.1)

2) Rumus/Cara perhitungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%

3) Capaian Indikator

Tabel 9 : Data Faktor Risiko yang Dikendalikan

FAKTOR RISIKO	JUMLAH YANG DIPERIKSA	JUMLAH FAKTOR RISIKO YANG DITEMUKAN	JUMLAH FAKTOR RISIKO YANG DIKENDALIKAN	PERSENTASE (%)	TARGET (%)
Pemeriksaan Orang	361.481	15	15	100	95%
Pemeriksaan Alat Angkut	14.391	846	846	100	95%
Pemeriksaan Barang	633	116	116	100	95%
Pemeriksaan Lingkungan	7.987	99	99	100	95%
Total	384.492	1.076	1.076	100%	95%

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- a) Melakukan skrining penyakit secara rutin dan kontiniu di pintu masuk
- b) Memfasilitasi sarana dan prasarana (alat kesehatan dan bahan habis pakai) kesehatan untuk mendukung pemeriksaan pelaku perjalanan
- c) Presentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada lingkungan:
 - Pemasangan perangkap tikus
 - Survei, larvasida dan Pemberantasan Sarang Nyamuk
 - Pengendalian vektor DBD melalui fogging dan pengkabutan
 - IRS

- Survei dan pengendalian vektor diare.
 - Edukasi kepada pemilik TPM
 - Desinfeksi ruangan terminal penumpang
- 5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Keberhasilan pengendalian faktor risiko di pintu masuk sebagai akibat dari adanya dukungan dari lintas sektor dan lintas program di wilayah kerja
- 6) Kendala/masalah yang dihadapi
- a) Sehubungan dengan ruang VIP yang letaknya terpisah dari ruang kedatangan penumpang di bandara sehingga pengawasan harus dilakukan di dua tempat, sedangkan SDM terbatas
 - b) Beberapa jenazah yang dikirim dari kabupaten lain dan transit di Merauke tidak memenuhi syarat pemetian

Pemecahan Masalah

- c) Menyampaikan permasalahan secara lisan kepada pihak pengelola bandara dalam rapat evaluasi bandara sehat.
 - d) Menyampaikan usulan ke pihak UPBU dan Otoritas bandara agar semua penumpang yang datang dan berangkat harus melalui ruang kedatangan dan keberangkatan bandara.
 - e) Melakukan sosialisasi kepada pihak maskapai, dinas kesehatan, Rumah sakit dan fasyankes tentang tatacara pemetian jenazah yang akan diangkut
- 7) Efisiensi penggunaan sumber daya
- a) Pemeriksaan beberapa kapal dilakukan oleh petugas yang sama sehingga terjadi efisiensi penyerapan anggaran transport lokal
 - b) Penggabungan kegiatan skrining HIV dan skrining malaria pada pergantian Satgas Pamtas
 - c) Penggabungan kegiatan skrining Covid-19 dan skrining TB di pintu masuk
 - d) Tindakan desinfeksi barang bawaan / bagasi penumpang dan alat angkut dilakukan secara mandiri oleh pihak Unit Pengelola Bandara (UPBU) sehingga mengurangi anggaran satker (belanja bahan dan transport lokal petugas)

Tabel 10
Realisasi anggaran indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang
dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Pelayanan kegawatdaruratan	26.850.000	26.845.647	4.353
2	pengendalian vektor FBD	23.830.000	21.693.627	2.136.373
3	Pengendalian vektor diare	13.320.000	13.253.198	66.802
4	pengendalian vektor malaria	4.932.000	4.932.000	-
5	<i>Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan Wilayah Kerja Merauke dan dalam rangka Pelaksanaan PON</i>	118.151.000	112.525.556	5.625.444
6	<i>Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan PLBD (Kualitas air, Makanan, limbah, Udara, Sanitasi Gedung Bangunan) Wilayah Kerja dan Venue Pelaksanaan PON</i>	53.960.000	53.785.402	174.598
7	<i>Uji Resistensi Insectisida</i>	50.101.000	49.660.000	441.000
8	<i>Survey dan Pengendalain Vektor dan BPP Pelaksanaan PON (Venue dan Penginapan)</i>	189.775.000	153.680.626	36.094.374
9	<i>Rapat Evaluasi Pelaksanaan PON 2021</i>	15.300.000	11.378.800	3.921.200
10	<i>Tindakan Pengendalian Faktor Risiko Alat Angkut, Orang dan Barang (Isolasi, Deratisasi, Desinfeksi, Desinseksi, Dekontaminasi) Termasuk dalam rangka PON</i>	4.050.000	3.920.000	130.000
11	<i>Pengadaan Alat dan bahan Medis dan Non Medis untuk pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan PON 2021</i>	403.625.000	394.240.041	9.384.959
12	Pengadaan Bording Kit	12.000.000	11.998.800	1.200
	Jumlah	915.894.000	857.913.697	57.980.303

CKi = 105% (1,05)

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{1((915.894.000 \times 1,05) - 857.913.697)}{915.894.000 \times 1,05} \times 100 \%$$

Efisiensi = 10,79 %

c. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

1) Defenisi Operasional

Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun

a) Kelengkapan data surveilans

b) Jumlah sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam

c) Penyusunan rencana kontijensi

d) Indeks pinjal ≤ 1

Jumlah pinjal *xenopsylla cheopis* dibagi dengan jumlah tikus yang diperiksa

e) HI Perimeter = 0

Persentase rumah yang positif terdapat larva *aedes aegypti* / bangunan yang negatif larva

f) Tidak ditemukan larva anopheles

Persentase habitat perkembangbiakan positif larva *Anopheles sp* / jumlah seluruh habitat yang diamati

g) Kepadatan kecoa rendah

Angka rata rata populasi kecoa pada wilayah yang di hitung berdasarkan jumlah kecoa tertangkap per perangkap per malam

h) Kepadatan lalat ≤ 2

Angka rata-rata populasi lalat pada suatu lokasi yang di ukur dengan menggunakan flygrill

i) TTU memenuhi syarat

Jumlah tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan di wilayah Pelabuhan Bandara dan PLBD

j) TPM laik hygiene

Jumlah tempat pengolahan makanan yang laik higiene sanitasi makanan di wilayah Pelabuhan, Bandara dan PLBD .

k) Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan

Jumlah Sarana air bersih, dilingkungan Pelabuhan, Bandara, dan PLBD yang memenuhi syarat kesehatan.

2) Rumus/Cara perhitungan

Akumulasi persentase target dan capaian:

a) Kelengkapan data surveilans

b) Jumlah sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam

c) Penyusunan rencana kontijensi

d) Indeks pinjal ≤ 1

e) HI Perimeter = 0

- f) Tidak ditemukan larva anopheles
- g) Kepadatan kecoa rendah
- h) Kepadatan lalat ≤ 2
- i) TTU memenuhi syarat
- j) TPM laik hygiene
- k) Kualitas air bersih memenuhi syarat

Kesebelas persentasi parameter dijumlahkan dan dibagi 11 dikali 100%

3) Capaian Indikator

- a) Kelengkapan data surveilans

$$\frac{\text{Jumlah data surveilans}}{\text{jumlah target data surveilans}} \times 100 \%$$

$$\frac{1628}{2484} \times 100 \% = 66\%$$

- b) Jumlah sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam

$$\frac{\text{Jumlah SKD KLB yang direspon}}{\text{Jumlah SKD yang diterima}} \times 100 \%$$

$$\frac{73}{96} \times 100 \% = 76\%$$

- c) Penyusunan rencana kontijensi

$$\frac{\text{Jumlah dokumen renkon yang dibuat}}{\text{Jumlah target dokumen renkon}} \times 100 \%$$

$$\frac{1}{1} \times 100 \% = 100\%$$

- d) Indeks pinjal ≤ 1

$$\frac{\text{Jumlah wilayah kerja yang bebas pinjal } \textit{xenopxillah cheopis}}{\text{jumlah wilayah kerja}} 100 \%$$

$$\frac{53}{45} 100 \% = 118\%$$

- e) HI Perimeter = 0

$$\frac{\text{Jumlah wilayah kerja HI perimeter =0}}{\text{jumlah wilayah kerja}} \times 100 \%$$

$$\frac{56}{60} 100 \% = 93\%$$

- f) Tidak ditemukan larva anopheles

$$\frac{\text{Jumlah wilayah kerja yang bebas pinjal } \textit{xenopxillah cheopis}}{\text{jumlah wilayah kerja}} 100 \%$$

$$\frac{65}{60} 100\% = 108\%$$

- g) Kepadatan kecoa rendah

$$\frac{\text{Jumlah wilayah kerja indeks populasi } < 2}{\text{jumlah wilayah kerja}} 100 \%$$

$$\frac{65}{60} 100 \% = 108\%$$

- h) Kepadatan lalat ≤ 2

$$\frac{\text{Jumlah wilayah kerja indeks populasi} < 2}{\text{jumlah wilayah kerja}} 100 \%$$

$$\frac{65}{60} 100 \% = 108\%$$
- i) TTU memenuhi syarat

$$\frac{\text{Jumlah Wilker yang memiliki TTU yang memenuhi syarat}}{\text{jumlah Wilker}} 100 \%$$

$$\frac{119}{98} 100 \% = 121\%$$
- j) TPM laik hygiene

$$\frac{\text{Jumlah TPM yang memenuhi syarat}}{\text{jumlah TPM yang diperiksa}} 100\%$$

$$\frac{49}{28} 100\% = 175\%$$
- k) Kualitas air bersih memenuhi syarat

$$\frac{\text{Jumlah Wilker yang memiliki SAB memenuhi syarat}}{\text{jumlah Wilker}} 100\%$$

$$\frac{1039}{1080} 100\% = 96\%$$

Tabel 11

Persentase Parameter Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara

Indikator	Parameter	Target	Capaian	Persentase Capaian
Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun			
	Kelengkapan data surveilans	2.484	1628	66%
	Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam	96	73	76%
	Penyusunan dokumen renkon yang baru	1	1	100%
	Indeks pinjal ≤ 1	45	53	118%
	HI perimeter = 0	60	56	93%
	Tidak ditemukan larva anopheles	60	65	108%
	kepadatan kecoa rendah	60	65	108%
	kepadatan Lalat > 2	60	65	108%
	TTU memenuhi syarat	98	119	121%
	TPM laik hygiene	28	49	175%
	Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	1080	1039	96%
Jumlah rata-rata				106%

Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dengan 11 parameter adalah 106%.

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- a) Peningkatan SDM untuk melaksanakan kegiatan surveilans
- b) Membuat jejaring informasi dalam rangka cepat tanggap respon SKD KLB
- c) Melakukan review dokumen renkon minimal 2 tahun sekali (update informasi tugas dan tanggung jawab sesuai kesepakatan dalam dokumen renkon)
- d) Indeks Pinjal <1

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator Indeks Pinjal tahun 2021 tidak ditemukan pinjal *Xenopxillah Cheopis* dan pinjal lainnya upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Edukasi kepada pemilik sarana dipelabuhan, Bandar Udara dan PLBN untuk memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar
- Mengimbau kepada masyarakat sekitar dan pengunjung pelabuhan, Bandar Udara dan PLBN agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan
- Pengangkutan sampah secara rutin setiap hari
- Melakukan pemasangan perangkap untuk mengendalikan populasi tikus

e) HI Perimeter = 0

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator HI Perimeter jentik *Aedes Aegypti* = 0, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Melakukan survei larva *Aedes Aegypti* secara rutin setiap bulan diwilayah perimeter dan buffer
- Melakukan larvasida dan PSN
- Melakukan edukasi kepada masyarakat, pengguna jasa dan lintas sektor diwilayah kerja KKP Merauke
- Melakukan pengendalian nyamuk dewasa (Fogging dan Pengkabutan)

f) Tidak ditemukan larva *anopheles*

Berdasarkan hasil perhitungan capaian Survei larva *Anopheles* pada tempat perindukan terdapat satu wilayah kerja ditemukan habitat larva *anopheles*, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Suvei habitat larva *anopheles* dan nyamuk dewasa
- Melakukan IRS
- Memelihara ikan pemakan jentik

g) Kepadatan kecoak rendah

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kepadatan Kecoak tidak ditemukan angka kepadatan > 2, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Survei Kecoak
 - Perbaikan sanitasi lingkungan
 - Edukasi kepada masyarakat untuk memelihara kebersihan lingkungan
 - Masyarakat dan pemilik sarana melakukan pengendalian kecoak secara mandiri
- h) Kepadatan lalat < 2
- Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator kepadatan lalat adalah 80%, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :
- Melakukan survei vektor diare setiap bulan
 - Melakukan pengendalian untuk menekan populasi lalat
 - Mengimbau kepada masyarakat sekitar dan pengunjung pelabuhan, Bandar Udara dan PLBN agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan
- i) TTU Memenuhi syarat
- Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator TTU Memenuhi syarat adalah 100%, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :
- Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap TTU
 - Berkoordinasi dengan stake holder untuk menyiapkan sarana dan prasarana TTU yang memenuhi syarat kesehatan
 - Pengguna TTU untuk memelihara dan menjaga kebersihan
- j) TPM Laik Hygiene
- Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator TPM Laik Hygiene adalah 175%, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :
- Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap TPM
 - Memberikan edukasi kepada pemilik Penjamah Makanan untuk menerapkan prinsip Hygiene sanitasi makanan
 - Menyarankan kepada pemilik dan pengelola untuk menyediakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat.
- k) Kualitas air bersih memenuhi syarat
- Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator Kualitas air bersih diperoleh hasil 96% yang memenuhi syarat, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :
- Melakukan pemeriksaan secara rutin
 - Edukasi kepada pengelola untuk menyiapkan sara air bersih yang memenuhi syarat
- 5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
- a) Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan lintas program
 - b) Desiminasi informasi hasil kegiatan kepada instansi terkait.

- c) Menyediakan media KIE di pintu masuk.
- 6) Kendala/masalah yang dihadapi
 - a) Dengan adanya pandemi COVID-19 pemda kabupaten Merauke mengeluarkan himbuan/edaran pembatasan aktivitas sehingga kegiatan surveilans data penyakit dari Dinkes kabupaten Merauke tidak rutin diterima
 - b) Dalam melakukan pengendalian vektor tidak semua masyarakat bersedia menerima tindakan *Indoor Residual Spraying*
 - c) Kurangnya pengetahuan penjamah makanan tentang personal hygiene
 - d) Sulitnya mendapatkan tenaga kader yang menetap sehingga mengganggu jadwal pelaksanaan rutinitas tugas kader
- 7) Pemecahan Masalah
 - a) Deseminasi data hasil surveilans menggunakan media online
 - b) Informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk media KIE (leaflet, spanduk, banner)
 - c) Merekrut tenaga kader baru, kemudian melatih cara melakukan survey vector
- 8) Efisiensi penggunaan sumber daya
 Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan tenaga kader yang konsisten sehingga tugas kader digantikan oleh pegawai KKP Merauke, hal ini menyebabkan terjadinya efisiensi anggaran transport lokal kader.

Tabel 12

Realisasi anggaran indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Pemetaan	2.320.000	2.277.751	42.249
2	Persiapan Alat dan Bahan	24.550.000	24.315.000	235.000
3	Pemasangan Perangkap	66.120.000	66.110.786	9.214
4	Identifikasi Tikus Pinjal	1.000.000	996.486	3.514
5	Pelaksanaan survei vektor DBD	45.600.000	44.097.972	1.502.028
6	Survei Jentik	1.890.000	1.608.359	281.641
7	Survey Nyamuk	40.000.000	39.600.000	400.000
8	survei vektor diare	31.120.000	29.011.258	2.108.742
9	Pengawasan/Pemeriksaan Sampel Makanan dan Minuman (Wilayah Kerja, Pelaksanaan Pra Embarkasi dan Debarkasi dan Pelaksanaan PON)	59.603.000	46.147.193	13.455.807
10	Sosialisasi/Reviu Dokumen Kontigensi KKM di Bandar Udara Mopah Merauke Persiapan Pelaksanaan PON	75.230.000	53.385.913	21.844.087
11	Pengadaan Alat dan bahan pengawasan vektor termasuk dalam rangka pelaksanaan PON 2021	272.818.000	269.734.852	3.083.148
	Jumlah	620.251.000	577.285.570	42.965.430

$$CKi = 106\% (1.06)$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{1((620.251.000 \times 1,06) - 577.285.570)}{1(620.251.000 \times 1,06)} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = 12,92 \%$$

d. Nilai kinerja anggaran

1) Defenisi Operasional

Nilai Kinerja Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

2) Rumus Cara Perhitungan

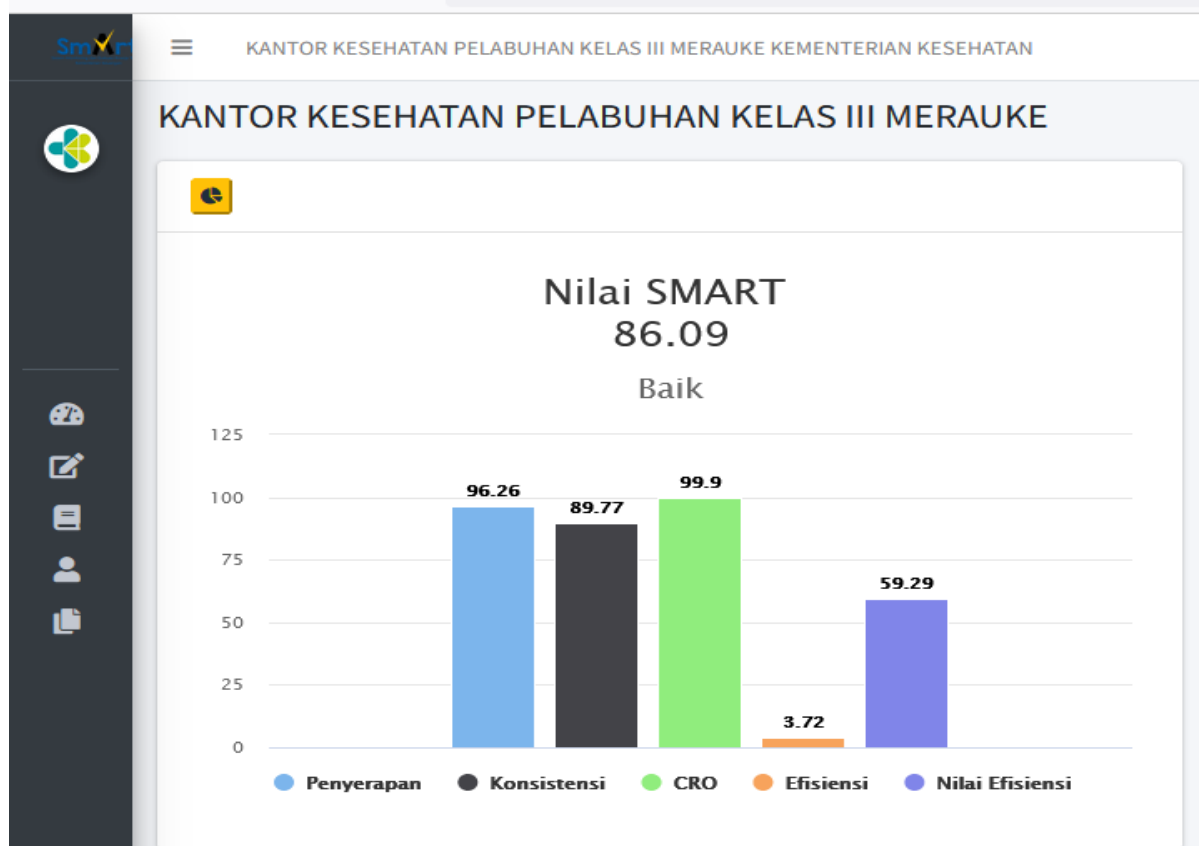
Nilai Kinerja Anggaran Satker dapat dilihat pada Aplikasi SMART berbasis web yang memudahkan satuan kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Tabel 13

Indikator SMART serta Persentase bobot

No	Indikator/Unsur Penilaian	% Bobot	% Pengaruh pada IKU PKPA
1	Capaian Keluaran	43,50%	26,10%
2	Efisiensi	28,60%	17,16%
3	Konsistensi	18,20%	10,92%
4	Penyerapan anggaran	9,70%	5,82%
		100,00%	60,00%

3) Capaian Indikator



Gambar 9 : Nilai Smart DJA

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- Perlunya perencanaan yang optimal
- Perlunya komitmen dalam melaksanakan kegiatan setiap bulan (sesuai dengan Rencana Penarikan Dana dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan)
- Meningkatkan *awareness* dalam melaksanakan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan setiap bulan
- Konsolidasi langkah penyelesaian masalah dan senantiasa melakukan evaluasi
- Menindaklanjuti permasalahan/kendala dari hasil evaluasi kegiatan
- Mengoptimalkan pelaksanaan Nilai Kinerja Anggaran pada satker sampai akhir tahun.
- Nilai kinerja anggaran harus sesuai dengan capaian riil

5) Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja anggaran di KKP Merauke didukung oleh :

- Penyusunan RPD dan RPK di awal tahun kegiatan
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal yang ditentukan
- Evaluasi penyerapan anggaran yang dilaksanakan setiap bulan

- 6) Kendala/masalah
Tidak ditemukan masalah
- 7) Pemecahan Masalah
Tidak ditemukan masalah
- 8) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 14

Realisasi Anggaran Indikator Nilai Kinerja Anggaran

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Pemeliharaan Sarana Gedung dan Bangunan	515.040.000	501.935.100	13.104.900
2	pengadaan Pakaian Dinas	180.250.000	179.699.000	551.000
3	Langganan Daya dan Jasa	181.800.000	165.923.975	15.876.025
4	Honor Tenaga Pramubakti, Kebersihan, Satpam dan Supir	956.670.000	934.273.250	22.396.750
5	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	118.680.000	113.448.000	5.232.000
6	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000	8.160.000	-
7	Honorarium Pengelola PNPB	26.640.000	24.240.000	2.400.000
8	Honorarium Pengelola SAI/BMN	12.600.000	12.600.000	-
9	Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN	7.200.000	7.200.000	-
10	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2, Roda 4 dan Kendaraan Khusus (Ambulance)	294.600.000	294.534.412	65.588
11	Keperluan Perkantoran	132.500.000	132.405.000	94.765
12	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Kantor	77.900.000	71.788.725	6.111.275
13	Pemeliharaan Peralatan Teknis	10.300.000	4.043.000	6.257.000
14	Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	53.010.000	52.690.000	320.000
15	Sewa Gedung Kantor	170.000.000	169.800.000	200.000
16	Pengganti Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris Pegawai Baru	18.000.000	17.965.000	35.000
17	Pelayanan Kantor Berhias	48.810.000	47.302.400	1.507.600
18	Pengelolaan BMN	50.850.000	50.819.898	30.102
19	Layanan Sarana Internal (Base Line)	400.000.000	399.300.000	700.000
	Jumlah	3.263.010.000	3.188.127.760	74.882.240

$$CKi = 104\% (1,04)$$

$$Efisiensi = \frac{\sum_{i=1}^n ((3.263.010.000 \times 1,04) - 3.188.127.760)}{\sum_{i=1}^n (3.263.010.000 \times 1,04)} \times 100 \%$$

$$Efisiensi = 6,05 \%$$

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

a) Defenisi Operasional

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

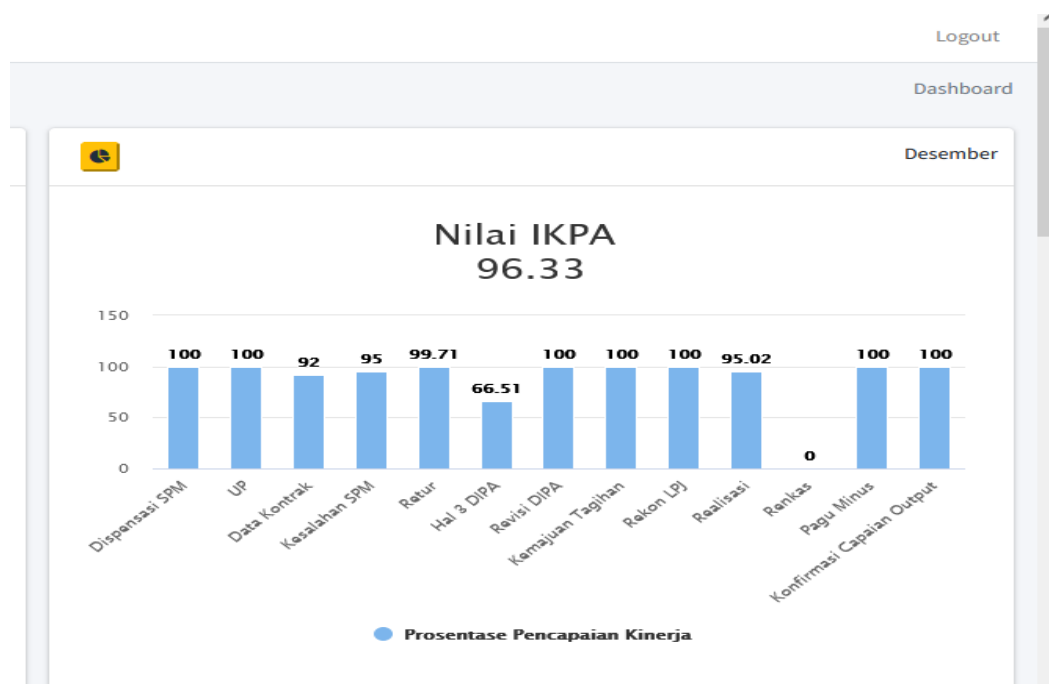
b) Rumus/Cara perhitungan

Tabel 15 :
Indikator IKPA serta Persentase bobotnya

No	Indikator/Unsur Penilaian	% Bobot	% Pengaruh pada IKU PKPA
1	Revisi DIPA	5,00%	2,00%
2	Deviasi Halaman III DIPA	5,00%	2,00%
3	Pagu minus	5,00%	2,00%
4	Data kontrak	15,00%	6,00%
5	Pengelolaan UP dan TUP	8,00%	3,20%
6	LPJ Bendahara	5,00%	2,00%
7	Dispensasi SPM	5,00%	2,00%
8	Penyerapan anggaran	15,00%	6,00%
9	Penyelesaian tagihan	12,00%	4,80%
10	Konfirmasi capaian output	10,00%	4,00%
11	Retur SP2D	5,00%	2,00%
12	Perencanaan kas	5,00%	2,00%
13	Kesalahan SPM	5,00%	2,00%
	Jumlah	100,00%	40,00%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa IKPA terdiri dari 13 indikator, dengan demikian bobot untuk masing-masing indikator relatif kecil. Bobot terbesar adalah indikator data kontrak dan penyerapan anggaran (15%) dan hanya berpengaruh masing-masing 6% dalam pencapaian IKU PKPA tahunan.

c) Capaian Indikator



Gambar 10 : Nilai IKPA

- d) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
 - 1) Mengurangi pelaksanaan Revisi DIPA
 - 2) Tidak terdapat pagu minus pada transaksi keuangan
 - 3) Kepatuhan dalam penyampaian laporan keuangan
 - 4) Tidak ada perbedaan rekonsiliasi internal SAK dengan SIMAK BMN
- e) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 - 1) SDM yang disiplin dalam melaksanakan input data dan upload data
 - 2) Komitmen yang tinggi untuk mewujudkan laporan keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel, disusun dan disajikan dengan basis akrual
 - 3) Peningkatan kualitas laporan keuangan melalui kegiatan reuiu
 - 4) Pendampingan penyusunan laporan keuangan
- f) Melaksanakan rekonsiliasi internal awal tahun
Kendala/masalah yang dihadapi
 - 1) Jaringan internet yang kurang mendukung sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan upload ADK
 - 2) Rekon eksternal antara SIMAK BMN dan SAIBA terdapat persediaan yang belum diregister
 - 3) Keterlambatan pengiriman ADK dropping Pusat ke Satker sehingga mengakibatkan rekon eksternal antara SIMAK BMN dan SAIBA dan meakukan rekon ulang internal (Upload ADK di aplikasi erekon)
- g) Pemecahan Masalah
 - 1) Melakukan revisi anggaran dan dialihkan pada kegiatan yang dapat menunjang program kegiatan
 - 2) Upaya percepatan penyerapan anggaran
 - 3) Mengikuti sosialisasi /webinar tentang upaya/ langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran

h) Efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 16
Realisasi Anggaran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Pembayaran gaji dan tunjangan	4.002.420.000	3.893.077.451	109.342.549
2	Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK)	2.000.000	1.976.387	23.613
3	Penyusunan RKAKL	106.932.000	106.932.000	-
4	Evaluasi/Penyusunan Laporan Tahunan	2.500.000	2.499.129	871
5	Penyusunan Laporan Indikator RAK, LAKIP, Perjanjian Kinerja	2.000.000	1.999.387	613
6	Evaluasi SAKIP	17.570.000	16.610.293	959.707
7	Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan/Triwulan/Semester/Tahunan	9.000.000	8.997.107	2.893
8	Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA E-I Laporan Keuangan	35.140.000	34.183.499	956.501
9	Rekonsiliasi Pengelolaan PNBPN	5.200.000	5.193.000	7.000
10	Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Keuangan	3.000.000	2.995.129	4.871
	Jumlah	4.185.762.000	4.074.463.382	111.298.618

$$CKi = 103\% (1,03)$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{1((4.185.762.000 \times 1,03) - 4.074.463.000)}{4.185.762.000 \times 1,03} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = 5,49\%$$

6. Kinerja implementasi WBK satker

a) Defenisi Operasional

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian yang dilakukan oleh oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.

b) Rumus/Cara perhitungan

Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai

Total Hasil. Penilaian terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu

1) Komponen pengungkit (60%)

- Manajemen perubahan (8%)
- Penataan tata laksana (7%)
- Penataan Sistem Manajemen SDM (10%)
- Penguatan akuntabilitas (10 %)
- Penguatan pengawasan(15 %)
- Peningkatan kualitas pelayanan public

Komponen hasil (40 %)

- Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN (20%)
- Kualitas pelayanan publik (20%)

c) Capaian Indikator

Nilai hasil evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 diperoleh nilai Oplementasi WBK 71,95 dengan rincian penilaian :

1) Komponen pengungkit : 39,21

- Manajemen perubahan : 2,82
- Penataan tata laksana : 2,47
- Penataan Sistem Manajemen SDM : 6,25
- Penguatan akuntabilitas : 9,45
- Penguatan pengawasan : 9,58
- Peningkatan kualitas pelayanan publik : 8,64

2) Komponen hasil : 32, 74

- Pemerintah yang bersih dan bebas dan bebas dari KKN : 18,95
- Kualitas pelayanan publik : 13,79

d) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- 1) Melakukan evaluasi kegiatan setiap pokja WBK secara teratur setiap bulan dengan melibatkan semua tim WBK
- 2) Membuat kesepakatan upaya tindak lanjut dari hasil assessment eselon 1
- 3) Melakukan advokasi dan Sosialisasi kepada pegawai terutama yang berada di wilayah kerja tentang implementasi WBK
- 4) Mengalokasikan anggaran pelatihan peningkatan pelayanan publik
- 5) Pembuatan media KIE tentang informasi Tolak Gratifikasi

e) Analisa Penyebab Kegagalan

Kegagalan dalam Implementasi WBK pada satker disebabkan oleh :

- 1) Evaluasi kegiatan setiap pokja dan Tim WBK tidak rutin dilaksanakan

- 2) Upaya tindak lanjut dari hasil assessment Itjen tahun 2020 belum sepenuhnya dilaksanakan
 - 3) Advokasi dan Sosialisasi kepada pegawai terutama yang berada di wilayah kerja tentang implementasi WBK belum dilaksanakan
- f) Kendala/masalah yang dihadapi
- 1) Belum semua pegawai terpapar tentang informasi Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
 - 2) Belum optimalnya komitmen bersama dalam menegakkan upaya Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
- g) Pemecahan Masalah
- 1) Melakukan pelatihan tentang peningkatan pelayanan publik
 - 2) Meningkatkan koordinasi antara tim Pokja WBK
 - 3) Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada semua pegawai tentang implementasi WBK
 - 4) Mendistribusikan media KIE tentang implementasi WBK ke wilayah kerja
- h) Efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 17

Realisasi anggaran indikator kinerja implementasi WBK Satker

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Layanan Humas	47.899.000	42.493.800	5.405.200
2	Layanan Organisasi, Tatalaksana Reformasi Birokrasi	29.040.000	28.572.711	467.289
	Jumlah	76.939.000	71.066.511	5.872.489

$$CKi = 96\% (0,96)$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{((76.939.000 \times 0,96) - 71.066.511)}{76.939.000 \times 0,96} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = 3,78 \%$$

7. Persentase peningkatan kapasitas SDM sebanyak 20 JPL dalam satu tahun

a) Defenisi Operasional

Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh jam pelajaran) dalam satu tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional

b) Rumus/Cara perhitungan

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi seluruh jumlah seluruh ASN dikali 100 %

c) Capaian Indikator

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL = $\frac{24}{30} \times 100 \%$

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL = 80 %

Tabel. 18 Persentase Peningkatan Kapasitas ASN

No	Nama	Pelatihan klasikal/ non klasikal						Jumlah JP dalam 1 tahun	Pemenuhan 20 JPL Pengembangan Kompetensi pertahun
		Tugas Belajar	Pelatihan Teknis	Seminar / Konferensi	Workshop/Lokakarya	Bimbingan Teknis	Sosialisasi		
1	Aan Hendra Sukma, SKM						6		Tidak terpenuhi
2	Afrina Musfiraa		51				9		Terpenuhi
3	Andarias Paskawanto Kolawil, SKM						100		Terpenuhi
4	Arwina Paramma, SKM						9		Tidak Terpenuhi
5	Batseba Linda Imsula	20							Terpenuhi
6	Bertha Tangke, BSc						52		Terpenuhi
7	Delifour Bekia BR.Hutagaol, SKM		54				81		Terpenuhi
8	Diana Beatrix Samon						15		Tidak terpenuhi
9	dr. Andi Farida		51				12		Terpenuhi
10	dr. Bambang Budiman						109		Terpenuhi
11	dr. Ika Juwita		51				33		Terpenuhi
12	dr. Maryam Wangguway		45				24		Terpenuhi
13	Elprida Silalahi, SKM		45				39		Terpenuhi

14	Eni Sartika Simanjuntak						103			Terpenuhi
15	Feri Henos Rerey, SKM						0			Tidak terpenuhi
16	Gumson Josua Tampubolon, SKM						138			Terpenuhi
17	Johlwis Tamalonggehe						53			Terpenuhi
18	Lilik Nur Kholidah		45				60			Terpenuhi
19	Martina Paulina Toker						45			Terpenuhi
20	Ns. Muhin Steven Imbiri, S.Kep						21			Terpenuhi
21	Oktavia Marindatu, SKM		6				63			Terpenuhi
22	Penataria Sianipar, SE						73			Terpenuhi
23	Pius Tandi Rantetasak						12			Tidak terpenuhi
24	Rika Pratiwi		45				33			Terpenuhi
25	Rosjunaida Malau, SE						72			Terpenuhi
26	Tri Nindi Gaib						27			Terpenuhi
27	Yeremias Wonam, SKM						48			Terpenuhi
28	Yulianti Lande, S.Si, Apt						166			Terpenuhi
29	Desi Rahmawati,SKM						90			Terpenuhi
30	Hesti Syafran Gani,AMK						18			Tidak terpenuhi

- d) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
- 1) Merencanakan dan menganggarkan peningkatan SDM setiap tahun
 - 2) Melakukan bimbingan teknis di wilayah kerja
 - 3) Meningkatkan kemampuan pegawai untuk belajar mandiri
- e) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
- Penyebab keberhasilan dari indikator peningkatan kapasitas SDM adalah :
- 1) Tersedianya anggaran untuk upaya peningkatan SDM
 - 2) Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pegawai untuk meningkatkan SDM
- f) Kendala/masalah yang dihadapi
- 1) Perencanaan anggaran yang direncanakan untuk upaya peningkatan SDM tidak terpenuhi
 - 2) Upaya peningkatan SDM dalam bentuk e-learning terkadang terhambat oleh jaringan internet yang tidak memadai terutama bagi pegawai yang bertugas di wilayah kerja
- g) Pemecahan Masalah
- 1) Pejabat struktural rutin melaksanakan evaluasi dan bimbingan teknis di wilayah kerja
 - 2) Pejabat struktural dapat menjadi coaching di kantor dengan tujuan meningkatkan wawasan dan kapasitas SDM
 - 3) Membuat perencanaan peningkatan ASN setiap tahun
- h) Efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 19 Realisasi anggaran indikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai	16.310.000	14.942.000	1.368.000
2	Peningkatan Kompetensi	24.000.000	23.766.976	233.024
3	Evaluasi/Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program	144.512.000	142.650.344	1.861.656
	Jumlah	184.822.000	181.359.320	3.462.680

$$CKi = 100 \% (1)$$

$$Efisiensi = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

$$Efisiensi = \frac{((184.822.000 \times 1) - 181.359.320)}{184.822.000 \times 1} \times 100 \%$$

$$Efisiensi = 1,87 \%$$

2. Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tabel 20

Capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya

No	Indikator	Definisi Operasional Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Capaian	Persentase Kinerja	Target	Capaian	Persentase Kinerja	Target	Capaian	Persentase Kinerja
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar	Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun	515.502	593.358	115,10%	297.332	363.171	118,78%	324.800	384.492	118%
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun (pada indikator no.1)	87	87	100,00%	90%	9975%	110,83%	95%	100%	105%
3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	-	-	-	85%	96,60%	113,65%	90%	106%	118%
4	Nilai Kinerja anggaran	Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik	100	100	100,00%	80	88	110%	83	86	104%
5	Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi	-	96,36	-	-	84,09	-	93	96	103%
6	Kinerja implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assesment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.	-	-	-	70	82,8	118,29%	75	71,95	96%
7	Persentase peningkatan kapasitas SDM sebanyak 80 JPL	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	-	-	-	45%	51,70%	114,89%	80%	80%	100%
	Jumlah capaian rata-rata		-	-	-			115,93%			106,28%

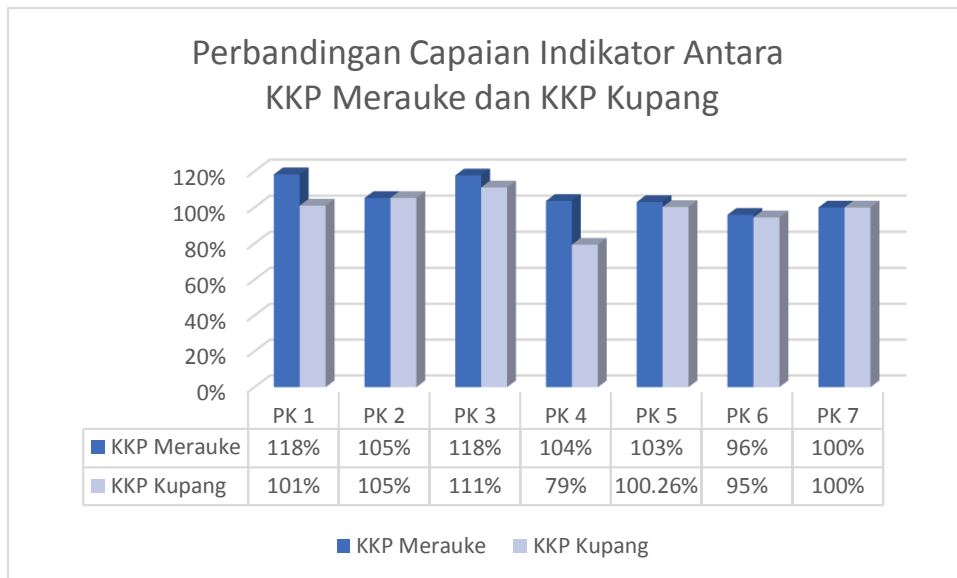
Dari tabel dapat dilihat bahwa semua target yang telah ditetapkan di tahun 2019 dan 2020 dapat mencapai/melebihi 100 %, hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik, hal ini tentunya ditunjang oleh anggaran, SDM, sarana dan prasarana yang memadai serta komitmen yang tinggi dari pegawai KKP Merauke. Capaian target tahun 2021 teradapat satu indikator yang tidak mencapai target 100 % yaitu indikator Kinerja Implementasi WBK, hal ini disebabkan karena upaya tindak lanjut dari hasil *assessment* Inspektorat Jenderal Kemenkes RI tahun 2020 belum

sepenuhnya dilaksanakan, evaluasi kegiatan setiap pokja dan tim WBK tidak rutin dilaksanakan, belum semua pegawai terpapar tentang informasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan belum optimalnya komitmen Bersama dalam menegakkan upaya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

3. Capaian Kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan KKP Kelas III Kupang

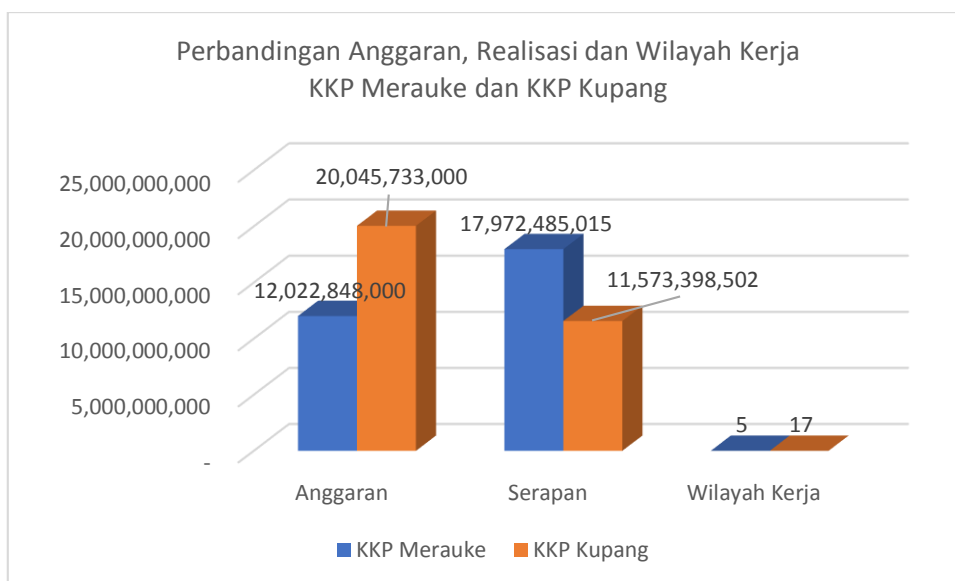
Tabel 21 Capaian Kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan KKP Kelas III Kupang

No	Indikator	Definisi Operasional Indikator	KKP Kelas III Merauke			KKP Kelas III Kupang		
			Target	Capaian	Persentase Kinerja	Target	Capaian	Persentase Kinerja
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar	Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun	324.800	384.492	118%	1.616.067	1.632.850	101%
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun (pada indikator no.1)	95%	100%	105%	95%	100%	105%
3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	90%	106%	118%	90%	100%	111%
4	Nilai Kinerja anggaran	Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik	83	86	104%	83	65,89	79%
5	Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi	93	96	103%	93	93,24	100,26%
6	Kinerja implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assesment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.	75	71,95	96%	75	70,89	95%
7	Persentase peningkatan kapasitas SDM sebanyak 80 JPL	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	80%	80%	100%	70%	70%	100%
Jumlah capaian rata-rata					106,28%			98,85%



Grafik 6

Perbandingan Capaian Indikator Antara KKP Merauke dan KKP Kupang



Grafik 7

Perbandingan Anggaran, Realisasi dan Wilayah Kerja KKP Merauke dan KKP Kupang

Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke melakukan perbandingan capaian kinerja dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang karena kedua KKP tersebut memiliki 3 (tiga) wilayah kerja yang sama yaitu wilayah kerja Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat Negara. Dari tabel dapat

dilihat bahwa dari 7 (tujuh) indikator di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke terdapat satu indikator yang tidak mencapai target 100 % yaitu indikator Kinerja Implementasi WBK (96%). Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke memiliki anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 12.022.848.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.573.398.502 (96,26%) sedangkan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang memiliki anggaran sebesar Rp. 20.045.733.000. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.972.485.015 (89,66%) Anggaran di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang lebih besar dari pada anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke karena Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang memiliki 17 wilayah kerja, sedangkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke memiliki 5 wilayah kerja.

B. SUMBER DAYA ANGGARAN

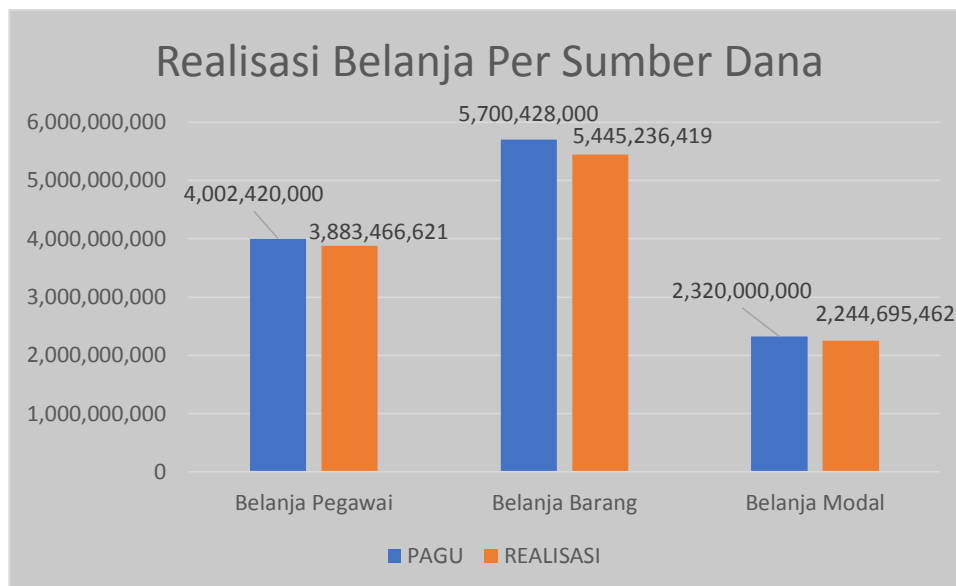
Sumber Daya Anggaran berdasarkan DIPA No. 024.05.2.416057/2021 tanggal 23 November 2020 Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2021 adalah sebesar Rp. 12,022.848.000.

1. Realisasi Belanja Per Sumber Dana

Realisasi Belanja per sumber dana dapat dilihat pada tabel:

Tabel 22 Realisasi Belanja Per Sumber Dana

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	Belanja Pegawai	4.002.420.000	3.883.466.621	97,03 %
2	Belanja Barang	5.700.428.000	5.445.236.419	95,52 %
3	Belanja Modal	2.320.000.000	2.244.695.462	96,75 %
	Persentase Keseluruhan	12.022.848.000	11.573.398.502	96,26 %



Grafik 8 Realisasi Belanja Per Sumber Dana

2. Persentase Serapan Anggaran Perbulan

Persentase serapan anggaran perbulan dapat dilihat pada tabel :

Tabel 23 Persentase Serapan Anggaran Perbulan

BULAN	PAGU	REALISASI	JUMLAH REALISASI	SISA PAGU	PERESENTASE
Januari	12.022.848.000	412.351.546	412.351.546	11.610.496.454	3,43%
Februari	12.022.848.000	604.691.992	1.017.043.538	11.005.804.462	8,46%
Maret	12.022.848.000	644.231.639	1.661.275.177	10.361.572.823	13,82%
April	12.022.848.000	1.028.453.357	2.689.728.534	9.333.119.466	22,37%
Mei	12.022.848.000	461.446.336	3.151.174.870	8.871.673.130	26,21%
Juni	12.022.848.000	1.527.611.705	4.678.786.575	7.344.061.425	38,92%
Juli	12.022.848.000	2.089.581.689	6.768.368.264	5.254.479.736	56,30%
Agustus	12.022.848.000	718.705.542	7.487.073.806	4.535.774.194	62,27%
September	12.022.848.000	802.399.915	8.289.473.721	3.733.374.279	68,95%
Oktober	12.022.848.000	990.734.914	9.280.208.635	2.742.639.365	77,19%
November	12.022.848.000	805.304.117	10.085.512.752	1.937.335.248	83,89%
Desember	12.022.848.000	1.487.885.750	11.573.398.502	449.449.498	96,26%



Grafik 9 Persentase serapan anggaran perbulan

3. Penerimaan PNBP

Penerimaan PNBP pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke berasal dari Pemeriksaan Kapal dalam rangka penerbitan dokumen Kesehatan kapal (SSCEC, PHQC, COP, dan Health Book), ICV, dan Pemeriksaan/Pengobatan. Adapun realisasi penerimaan PNBP dan realisasi penggunaan PNBP dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 24 Penerimaan dan Realisasi PNBP

No	Bulan	Target Dalam DIPA	Realisasi PNBP	Realisasi Penggunaan PNBP
1	Januari	26.512.084	20.055.000	-
2	Februari	26.512.084	28.030.000	-
3	Maret	26.512.084	31.605.000	7.541.486
4	April	26.512.084	27.010.000	23.107.586
5	Mei	26.512.084	32.345.000	2.078.000
6	Juni	26.512.084	26.875.000	42.144.167
7	Juli	26.512.084	21.355.000	30.920.516
8	Agustus	26.512.084	25.230.000	8.047.500
9	September	26.512.084	26.920.000	7.392.000
10	Oktober	26.512.084	25.740.000	
11	November	26.512.084	31.175.507	28.272.500
12	Desember	26.512.084	27.735.000	79.722.000
	Jumlah	318.145.008	324.075.507	229.225.755

4. Realisasi Pelayanan Output

Realisasi anggaran dan layanan dapat dilihat pada tabel

Tabel 25 Realisasi Pelayanan Output

No	Kegiatan	KRO	TVKRO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1	4249 Dukungan Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan)	1.315,00	1.646.005.000	1.488.787.969	90,45%
2	4249 Dukungan Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	RAB Sarana Bidang Kesehatan (Paket)	3	2.596.443.000	2.509.370.355	96,65%
3	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	EAA Layanan Perkantoran (Layanan)	24	6.765.770.000	6.574.172.318	97,17%
4	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (Layanan)	12	108.932.000	108.908.387	99,98%
5	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	EAC Layanan Umum (Layanan)	12	176.599.000	169.188.809	95,80%
6	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	EAD Layanan Sarana Internal (unit)	1	400.000.000	399.300.000	99,83%
7	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	EAF Layanan SDM (orang)	31	40.310.000	38.708.976	96,03%
8	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	EAJ Layanan Data dan Informasi (Layanan)	2	69.867.000	69.833.800	99,95%
9	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan)	12	166.582.000	163.759.153	98,31%
10	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	FAH Pengelolaan Keuangan Negara (Laporan)	12	52.340.000	51.368.735	98,14%
	Jumlah		1.424,00	12.022.848.000	11.573.398.502	96,26%

C. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Perbandingan Nilai BMN Pada Laporan Barang Dan Laporan Keuangan

Nilai BMN pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Iii Merauke per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 36.482.502.522 (tiga puluh enam milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus dua puluh dua), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca gabungan intrakomtabel dan ekstrakomtabel yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26 Neraca Sarana dan Prasarana

NO	Uraian Neraca	IntraKomptabel (Rp)	%	EkstraKomptabel (Rp)	%	Gabungan (Rp)	%
I Aset Lancar							
1	Persediaan	219.069.454	100,00	0	0,00	219.069.454	100
	Sub Jumlah	219.069.454	100,00	0	0,00	219.069.454	100
II Aset Tetap							
1	TANAH	6.129.239.000	100,00	0	0,00	6.129.239.000	100
2	PERALATAN DAN MESIN	19.179.695.336	99,96	8.525.732	0,04	19.188.221.068	100
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	10.524.458.000	100,00	0	0,00	10.524.458.000	100
	Sub Jumlah	35.833.392.336	99,98	8.525.732	0,02	35.841.918.068	100
III Aset Lainnya							
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	421.515.000	100,00	0	0,00	421.515.000	100
	Sub Jumlah	421.515.000	100,00	0	0,00	421.515.000	100
	Total	36.473.976.790	99,98	8.525.732	0,02	36.482.502.522	100

..

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari realisasi anggaran berdasarkan indikator dapat dilihat bahwa semua anggaran yang dialokasikan pada setiap indikator tidak terserap 100 %, akan tetapi dari 7 (tujuh) indikator terdapat 6 (enam) indikator yang capaian targetnya mencapai/melebihi 100 % dan 1 (satu) satu indikator yang capaian targetnya kurang dari 100 % . Rincian persentase capaian 7 (tujuh) target adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan sebesar 118 %
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 105 %
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 118 %
4. Nilai kinerja anggaran sebesar 104 %
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 103 %
6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 96 %
7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 104 %

Rata-rata capaian indikator pada tahun 2021 adalah sebesar 106, 28 % lebih rendah dari rata-rata capaian indikator pada tahun 2020 (115,92 %) dan tahun 2019 (107,92 %).

Keberhasilan pencapaian 6 (enam) target tahun 2020 disebabkan karena :

1. Disiplin dan komitmen dari pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke
2. Kerjasama yang baik dengan Lintas Program dan Lintas Sektor
3. Sarana dan prasarana yang memadai

Kegagalan pencapaian 1 (satu) target indikator yaitu target Kinerja implementasi WBK disebabkan karena

1. Evaluasi kegiatan setiap pokja dan Tim WBK tidak rutin dilaksanakan
2. Upaya tindak lanjut dari hasil *assessment* Itjen tahun 2020 belum sepenuhnya dilaksanakan
3. Advokasi dan Sosialisasi kepada pegawai terutama yang berada di wilayah kerja tentang implementasi WBK belum dilaksanakan
4. implementasi WBK pada Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke belum optimal

Dari *assessment* yang dilakukan oleh Ditjen P2P diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa Pokja yang belum memahami kegiatan yang harus dilaksanakan dalam Pokja sehingga nilai *assessment* beberapa Pokja tidak mencapai target yang ditetapkan pada Permenpan RB No.

52 tahun 2019 tentang penetapan target WBK

Berdasarkan DIPA No. 024.05.2.416057/2021 tanggal 23 November 2020 anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2021 adalah sebesar Rp. 12,022.848.000. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.583.009.332 (96,34%), sedangkan berdasarkan DIPA No. 024.05.2.416057/2020 tanggal 12 November 2019 Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2020 sebesar Rp. 12,182.878.000,- serapan anggaran sebesar Rp. 9.788.761.195 (80,35%) dan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 11.255.937.000,- realisasinya sebesar Rp. 10.845.930.735 (96,36 %). Serapan anggaran tahun 2021 semakin meningkat dibanding dengan serapan anggaran tahun 2020. Diharapkan dari kegagalan dan keberhasilan yang diperoleh dalam mencapai target di tahun 2020 dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun 2022.

B. Tindak Lanjut

Menindaklanjuti hasil capaian kinerja tahun 2021 ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut di tahun 2022 yaitu :

1. Meningkatkan kerjasama dengan Lintas Sektor dan Lintas Program lebih optimal
2. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk mengetahui permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan
3. Membuat perencanaan lebih akurat dan tepat
4. Meningkatkan komitmen dan disiplin seluruh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke
5. Melakukan efisiensi/sisa anggaran untuk dialokasikan pada kegiatan yang lain yang dapat menunjang/mendukung pencapaian target indikator
6. Membuat/ menjadwalkan peningkatan SDM semua pegawai



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Bambang Budiman
Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 10.437.235.000,- berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
NIP 197110032005011002

dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE**

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeamtinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	324.800
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%
		3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	90%
		4	Nilai kinerja anggaran	83
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		6	Kinerja implementasi WBK satker	72
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekeamtinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Rp.	2.652.202.000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rp.	7.785.033.000
	TOTAL	Rp. 10.437.235.000

Jakarta, Desember 2020

Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,



dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
NIP 197110032005011002

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke



dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Bambang Budiman
Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 12.877.560.000,- berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS
NIP 196405201991031003

dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE**

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	324,800
		2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	90%
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	83
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Rp.	5.092.527.000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rp.	7.785.033.000
TOTAL		Rp. 12.877.560.000

Jakarta, September 2021

Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke



Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS
NIP 196405201991031003



dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Bambang Budiman
Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 12.022.848.000,- berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2021

Pihak Kedua,

Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS
NIP 196405201991031003

Pihak Pertama,

dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE**

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaaan kesehatan	324,800
		2	Persentase faktor risiko penyakit d di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	90%
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	83
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp. 4.242.448.000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 7.780.400.000
TOTAL		Rp. 12.022.848.000

Jakarta, November 2021

Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke


Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS
NIP 196405201991031003


dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001